

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM
MENANGANI STUNTING MELALUI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS DI KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Nuansa Fitri Rahmadiani

NPP. 31.0601

Asdaf Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Email: nuansarahma2121@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Muhammad Faisal, S.Pd., M.Pd.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The author's focus in this research is on implementing a collaborative process in handling stunting through the Quality Family Village Program in the Benua Melayu Laut Subdistrict, Pontianak City. The high prevalence rate of stunting in Benua Melayu Laut Subdistrict is greater than in Pontianak City and South Pontianak District. Purpose:* *This research aims to find out and analyze collaborative governance in dealing with stunting through the Quality Family Village Program in Benua Melayu Laut Subdistrict, Pontianak City and to find out and analyze the inhibiting factors. Method:* *This research uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews, observation and documentation. Data analysis was carried out by data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The analysis of this research uses the collaboration process theory according to Ansell and Gash which consists of 5 (five) dimensions. Result:* *The author's findings in this research are that collaboration between stakeholders has been established quite well and has resulted in positive changes, but collaboration with the private sector is still tentative. In this research, it was found that the obstacles were the lack of public awareness, people's habits which tended to prefer practical things, the involvement of the person responsible for each stakeholder in each meeting was still lacking, and the budget was felt to still not meet needs. Conclusion:* *The collaboration carried out by the government, the private sector and the community in the context of handling stunting through the Quality Family Village Program in Benua Melayu Laut Subdistrict has gone quite well because in its implementation there have been regular meetings held where these meetings have resulted in a joint commitment and the same understanding in between stakeholders. Regarding trust between stakeholders, it has also been built because there are regular reports submitted and the community itself knows the personalities of the representatives of each party who go to the field. Furthermore, the results of the implementation of the Quality Family Village Program in Benua Melayu Laut Subdistrict have shown changes in a positive direction, marked by a reduction in the number of stunting cases.*

Keywords: *Collaborative governance, Stunting, Quality Family Village*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Fokus penulis dalam penelitian ini yaitu pada pelaksanaan proses kolaborasi dalam menangani *stunting* melalui Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Benua Melayu Laut Kota Pontianak. Tingginya angka prevalensi *stunting* di Kelurahan Benua Melayu Laut yang angkanya lebih besar daripada Kota Pontianak dan Kecamatan Pontianak Selatan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan

menganalisis *collaborative governance* dalam menangani *stunting* melalui Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Benua Melayu Laut Kota Pontianak serta mengetahui dan menganalisis faktor penghambatnya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis penelitian ini yaitu menggunakan teori proses kolaborasi menurut Ansell dan Gash yang terdiri dari 5 (lima) dimensi. **Hasil/Temuan:** Temuan penulis pada penelitian ini adalah kolaborasi di antara *stakeholder* sudah terjalin dengan cukup baik dan telah menghasilkan perubahan kearah positif, tetapi terkait dengan kolaborasi dengan pihak swasta masih bersifat tentatif. Adapun dalam penelitian ini ditemukan bahwa yang menjadi hambatan adalah minimnya kesadaran masyarakat, kebiasaan masyarakat yang cenderung menyukai hal praktis, keterlibatan penanggungjawab setiap *stakeholder* dalam setiap pertemuan yang masih kurang, serta anggaran yang dirasa masih belum memenuhi kebutuhan. **Kesimpulan:** kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam rangka penanganan *stunting* melalui Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Benua Melayu Laut sudah berjalan dengan cukup baik karena pada pelaksanaannya sudah ada pertemuan rutin yang dilakukan dimana pertemuan tersebut menghasilkan sebuah komitmen bersama dan pemahaman yang sama di antara *stakeholder*. Perihal kepercayaan antar *stakeholder* juga sudah terbangun karena adanya laporan berkala yang disampaikan dan pihak masyarakat sendiri mengenal pribadi dari perwakilan setiap pihak yang turun ke lapangan. Selanjutnya hasil dari pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Benua Melayu Laut ini sudah menunjukkan perubahan kearah yang positif yang ditandai dengan berkurangnya jumlah kasus *stunting*.

Kata Kunci: *Collaborative governance*, *Stunting*, Kampung Keluarga Berkualitas

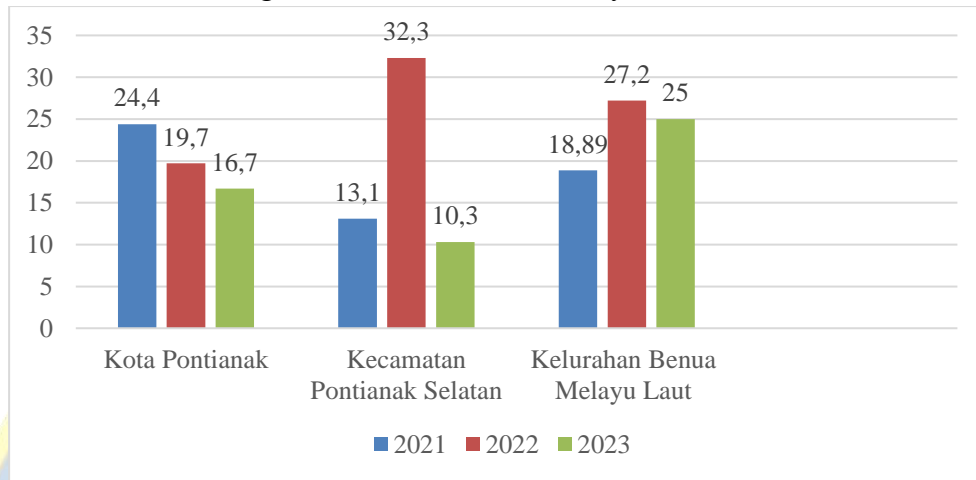
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan balita pendek atau yang lebih dikenal sebagai *stunting* masih menjadi kasus besar dan fokus pemerintah Indonesia dalam bidang kesehatan. Provinsi Kalimantan Barat berada pada urutan ke-8 sebagai provinsi dengan angka prevalensi tertinggi setelah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Papua, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Papua Barat, dan Sulawesi Tengah, dimana angka prevalensi *stunting* di Kalimantan Barat sebesar 27,8 persen dimana angka tersebut masih tergolong tinggi karena menurut World Health Organization (WHO) angka dengan kategori tinggi berkisar dari 20-30 persen. *Stunting* juga menjadi masalah kesehatan yang harus ditangani oleh Pemerintah Kota Pontianak. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka *stunting* di Kota Pontianak pada tahun 2022 sebesar 19,7 persen dimana itu sudah mengalami penurunan dari tahun 2021 yang berada di angka 24,4 persen. Melihat hasil tersebut, pemerintah Kota Pontianak semakin gencar untuk menurunkan angka prevalensi *stunting*. Hal tersebut dikarenakan pemerintah pusat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menargetkan pada tahun 2024 kasus *stunting* harus menginjak angka 14 persen. Kelurahan Benua Melayu Laut merupakan satu-satunya lokasi Program Kampung Keluarga

Berkualitas yang masuk ke dalam sepuluh kelurahan sasaran penurunan *stunting* di Kota Pontianak.

Gambar 1. 1
Perbandingan Angka *Stunting* di Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Selatan
dengan Kelurahan Benua Melayu Laut



Sumber: Diolah oleh penulis, 2023

Gambar 1.1 memperlihatkan perbandingan angka prevalensi *stunting* antara Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Selatan dan Kelurahan Benua Melayu Laut yang bersumber dari laporan gizi Puskesmas Purnama. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa angka prevalensi *stunting* di Kelurahan Benua Melayu Laut mengalami tren naik dimana pada tahun 2021 sebesar 18,89% dari total jumlah balita sebanyak 79 anak, tahun 2022 sebesar 27,2% dari total jumlah balita sebanyak 147, dan pada 2023 mencapai angka 25% dari total jumlah balita sebanyak 128 anak. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa angka tersebut lebih besar dari angka prevalensi *stunting* Kota Pontianak sebesar 16,7% dan Kecamatan Pontianak Selatan sebesar 10,3% pada tahun yang sama.

Pemerintah dalam rangka menangani *stunting* tentunya melakukan berbagai upaya. Adapun upaya tersebut dilakukan salah satunya melalui kolaborasi dengan berbagai pihak yang dianggap dapat menyelesaikan masalah *stunting* ini karena permasalahan ini bukan hanya berkaitan dengan satu aspek saja. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kolaborasi tersebut, pemerintah memiliki suatu program yaitu Kampung Keluarga Berkualitas. Menurut Rossy dan Buyung (2018:9) “Dalam suatu pelaksanaan program, suatu lembaga atau badan berusaha melaksanakan kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang berguna untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan” (Lambelanova, Rossy; Ramadhan, Muhammad Buyung). Melalui kolaborasi dari berbagai pihak yang tentunya berusaha melaksanakan kegiatan yang mengarah pada hasil atau tujuan seharusnya angka prevalensi *stunting* dapat ditekan. Oleh sebab itu, penelitian mengenai kolaborasi pemerintahan dalam menangani penurunan angka *stunting* di Kelurahan Benua Melayu Laut dengan judul penelitian, “*Collaborative governance* dalam Menangani *Stunting* Melalui Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Benua Melayu Laut Kota Pontianak” sangat penting untuk dilakukan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pemerintah telah melakukan upaya penanganan *stunting* melalui kolaborasi dengan berbagai sektor. Melalui kolaborasi dari berbagai pihak tersebut seharusnya angka prevalensi *stunting* dapat ditekan. Namun, pada kenyataannya berdasarkan data pada gambar 1.1 yang menginformasikan bahwa angka prevalensi *stunting* di Kelurahan Benua Melayu Laut masih sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari angka prevalensi *stunting* Kota Pontianak dan Kecamatan Pontianak Selatan. Oleh sebab itu, penelitian mengenai kolaborasi pemerintahan dalam menangani penurunan angka *stunting* di Kelurahan Benua Melayu Laut dengan judul penelitian, “*Collaborative governance* dalam Menangani *Stunting* Melalui Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Benua Melayu Laut Kota Pontianak” sangat penting untuk dilakukan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan 10 (sepuluh) sumber penelitian terdahulu sebagai referensi dengan memperhatikan keserasian dan kesamaan dengan tujuan dan permasalahan penelitian. Penelitian Lailatus Suhroh dan Galih Wahyu Pradana (2021) yang berjudul Peran pemerintah Desa Ko’olan dalam Penekanan *Stunting* Melalui Program Gopo (Gojek Posyandu) untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bangkalan menemukan bahwa pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan pengurus GOPO, pengelolaan anggaran dana desa serta media sosial sebagai sarana informasi bagi masyarakat (Suhroh & Pradana, 2021). Penelitian Hazana Bedasari, dkk (2022) yang berjudul Strategi Dinas Kesehatan Dalam Pencegahan dan Penanganan *Stunting* (Studi kasus di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun) menemukan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun belum berhasil menurunkan angka *stunting* di Desa Pongkar dari 2,76% tahun 2019, menjadi 7,6% tahun 2020, dan mengalami kenaikan 12,8% tahun 2021 (Bedasari et al., 2022). Penelitian Puji Lestari, dkk (2022) yang berjudul Peranan Pemerintah Desa dalam Pencegahan *Stunting* Di Desa Kencana Kecamatan Balai Jaya Tahun 2022 menemukan bahwa peranan pemerintah desa sudah dilakukan dengan baik sehingga Desa Kencana terhindar dari *stunting* (Lestari et al., 2022). Penelitian Noviansyah (2022) yang berjudul Strategi Percepatan Pencegahan *Stunting* dengan Pendekatan Keagamaan guna mewujudkan Generasi Berkualitas (Studi pada Wilayah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu) menemukan hasil bahwa pemberdayaan masyarakat dalam percepatan penurunan *stunting* belum optimal dalam pelaksanaannya di masyarakat (Noviansyah, 2022). Penelitian Dhea Jayanti Pratiwi (2023) yang berjudul Strategi Pencegahan *Stunting* di Kecamatan Medan Timur Kota Medan menemukan hasil bahwa penurunan prevalensi *stunting* di Kecamatan Medan Timur dari 10 menjadi delapan balita *stunting* tidak dipengaruhi oleh program D’GINTING ini melainkan bahwa anak tersebut sudah lebih dari lima tahun, secara pelaksanaan program D’GINTING kurang efektif namun tetap memberikan dampak positif pada pemenuhan asupan makanan pada anak namun program tersebut berjalan tiga bulan dan pelaksanaannya 14 hari disetiap bulannya, selain itu dalam program D’GINTING hanya berfokus pada perbaikan gizi dan nutrisi balita *stunting*, faktor penghambat pencegahan *stunting* di Kecamatan Medan Timur adalah ketidaksiapan anggaran dana, sarana dan prasarana, dan sosialisasi yang kurang maksimal (Pratiwi, 2023). Penelitian Andi Reski Aprian (2022) yang berjudul Efektivitas Program Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar menemukan hasil bahwa program percepatan penurunan

stunting Di Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar belum efektif (Apriani, 2016). Penelitian Erina Fahzira (2021) dengan judul Implementasi Kebijakan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kampar dengan hasil bahwa implementasi kebijakan penurunan *stunting* di Kabupaten Kampar belum dapat berjalan maksimal, hal ini dibuktikan dengan belum terlaksananya aspek Komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi (Fahzira, 2021). Penelitian Sri Hajija Purba (2019) yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan *Stunting* di Desa Secanggih Kabupaten Langkat yang menghasilkan implementasi kebijakan penurunan *stunting* di Desa Secanggih sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penurunan *Stunting*, tetapi masih ada program dari kebijakan tersebut yang belum terlaksana secara optimal, seperti pemberian ASI Eksklusif dan pemberian Inisiasi Menyusu Dini (IMD) (Purba, 2019). Penelitian Dwi Danti Fitria (2022) dengan judul Evaluasi Strategi Menekan Laju Penderita *Stunting* di Kabupaten Buton Selatan menghasilkan bahwa pelaksanaan delapan aksi konvergensi percepatan pencegahan *stunting* dapat menekan laju penderita *stunting* yang ada di Kabupaten Buton Selatan (Fitria, 2022). Penelitian Detya Sella Ekananda (2021) yang berjudul Evaluasi Program Inovasi Penurunan *Stunting* di Puskesmas Simpang Periuk Kota Lubuklinggau yang menunjukkan bahwa pada komponen input masih memiliki beberapa hambatan yakni belum adanya pelatihan SDM, kurangnya SOP yang mengatur, dan prasarana ruang pemeriksaan yang belum memadai sehingga program inovasi masih perlu diperbaiki dan dikembangkan agar dapat terlaksana dengan optimal (Ekananda, 2021).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan proses kolaborasi yang dilakukan oleh stakeholder dalam menangani *stunting* melalui Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Benua Melayu Laut Kota Pontianak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori proses kolaborasi menurut Ansell dan Gash dimana berbeda dengan teori yang digunakan pada sepuluh penelitian yang sudah dilampirkan sebelumnya. Adapun dalam penelitian ini juga berbeda terkait dimensi yang menjadi pisau analisisnya yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara.

1.5 Tujuan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis *collaborative governance* dalam menangani *stunting* melalui Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Benua Melayu Laut Kota Pontianak beserta faktor penghambat *collaborative governance* dalam menangani *stunting* melalui Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Benua Melayu Laut Kota Pontianak.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Didalam penelitian ini penulis menggunakan teori proses kolaborasi yang di kemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) yang terdiri dari 5 (lima) dimensi yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Selain itu, terkait faktor penghambat penulis menggunakan teori faktor penghambat menurut Notoadmojo (2003) dengan dimensi faktor internal dan

faktor eksternal. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi dan wawancara. Pengambilan sampel terhadap para penanggung jawab berjalannya program ini dipilih melalui purposive sampling, sedangkan pemilihan informan terhadap masyarakat yang mengikuti kegiatan penanganan *stunting* ini dipilih menggunakan teknik pengambilan sampel snowball sampling.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis *collaborative governance* dalam penanganan *stunting* melalui Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Benua Melayu Laut melalui teori proses kolaborasi menurut Ansell dan Gash dengan melihat dari lima hal, yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Selain itu penulis juga menganalisis faktor penghambat menurut Notoadmojo dengan melihat dari faktor internal dan faktor eksternal.

3.1 Proses Kolaborasi berdasarkan Teori Ansell dan Gash

Kolaborasi dimulai dengan pertemuan tatap muka yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerjasama. Penelitian ini menganalisis proses kolaborasi dalam penanganan *stunting* melalui Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Benua Melayu Laut dengan menggunakan data dari wawancara dengan informan, observasi, dan dokumentasi lapangan. Pertemuan tatap muka yang teratur membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, yang kemudian memperkuat komitmen terhadap kolaborasi. Komitmen ini menghasilkan pemahaman bersama mengenai visi dan misi yang jelas, yang menjadi kunci untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah bersama. Kolaborasi ini memainkan peran penting dalam mencapai hasil yang diinginkan oleh semua pihak yang terlibat. Proses kolaborasi ini mengacu pada teori Ansell dan Gash yang digunakan sebagai panduan untuk menilai hasil di lapangan.

1. Dialog Tatap Muka

Penulis melakukan wawancara, observasi, serta studi dokumentasi terkait ada atau tidaknya pertemuan rutin yang dilakukan dalam rangka penanganan *stunting* serta komunikasi dua arah yang terjadi di antara stakeholder. Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber penulis mengetahui bahwa pertemuan rutin sudah diadakan dan terjadwal oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak. Selain itu, melalui pertemuan rutin tersebut komunikasi dua arah antar stakeholder juga sudah terjadi dalam rangka bertukar informasi, perumusan strategi bersama, dan pemecahan masalah secara kolaboratif.

Tabel 3. 1

Data Pertemuan Rutin Kampung Keluarga Berkualitas dalam Penanganan *Stunting* di Kelurahan Benua Melayu Laut

No	Tanggal	Tempat	Perihal
1.	30 Mei 2023	Sekretariat Kampung KB Kapuas Ceria	Membuat menu untuk ibu hamil sesuai dengan kearifan budaya lokal
2.	19 Juni 2023	Sekretariat Kampung KB Kapuas Ceria	Membuat menu untuk ibu anak di bawah dua tahun sesuai dengan kearifan budaya lokal

3.	12 Juli 2023	Sekretariat Kampung KB Kapuas Ceria	Membuat menu untuk ibu anak di bawah dua tahun sesuai dengan kearifan budaya lokal
4.	29 Agustus 2023	Sekretariat Kampung KB Kapuas Ceria	Membuat menu untuk ibu hamil sesuai dengan kearifan budaya lokal
5.	29 September 2023	Sekretariat Kampung KB Kapuas Ceria	Membuat menu untuk calon pengantin sesuai dengan kearifan lokal
6.	2 Oktober 2023	Sekretariat Kampung KB Kapuas Ceria	Membuat menu untuk calon pengantin, ibu hamil, dan ibu anak di bawah dua tahun sesuai dengan kearifan lokal
7.	5 Oktober 2023	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak	Pangan aman dan ketahanan keluarga dalam pencegahan <i>stunting</i>
8.	17 November 2023	Sekretariat Kampung KB Kapuas Ceria	Penyerahan paket menu sehat dan membuat menu untuk calon pengantin, ibu hamil, dan ibu anak di bawah dua tahun sesuai dengan kearifan lokal
9.	18 November 2023	Gang Kuantan	Membuat menu untuk calon pengantin, ibu hamil, dan ibu anak di bawah dua tahun sesuai dengan kearifan lokal

Sumber: Diolah oleh penulis, 2024

Berdasarkan data dari pertemuan yang telah dilakukan, intervensi penanganan *stunting* mencakup intervensi spesifik dan sensitif. Sesuai dengan pedoman pelaksanaan intervensi penurunan *stunting* terintegrasi di kabupaten/kota, intervensi spesifik adalah kegiatan yang langsung mengatasi penyebab *stunting*, seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan, yang umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dalam hal ini oleh Puskesmas Purnama. Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa intervensi spesifik yang dilakukan meliputi pemberian paket menu sehat untuk calon pengantin, ibu hamil, dan ibu dengan anak di bawah lima tahun, seperti yang dilaksanakan pada pertemuan tanggal 17 November 2023. Selanjutnya, intervensi sensitif mencakup berbagai hal seperti peningkatan penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi, peningkatan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan ibu dan anak, serta peningkatan akses pangan bergizi. Intervensi sensitif ini umumnya dilakukan oleh pihak di luar sektor kesehatan. Dalam daftar pertemuan tersebut, intervensi sensitif yang telah dilakukan mencakup sosialisasi dan


praktik membuat menu untuk ibu hamil, ibu balita, dan calon pengantin sesuai dengan kearifan lokal. Kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama pihak kelurahan, serta dibantu oleh kader PKK dan pihak swasta.





2. Membangun Kepercayaan

Penulis melakukan wawancara, observasi, serta studi dokumentasi terkait ada atau tidaknya laporan secara berkala dalam rangka membangun kepercayaan di antara stakeholder yang dilakukan dalam rangka penanganan *stunting* serta pengenalan stakeholder oleh masyarakat sebagai objek serta subjek dari program ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Kampung KB Kelurahan Benua Melayu Laut diketahui bahwa sudah ada laporan secara berkala dimana laporan tersebut disusun oleh tim pendamping keluarga *stunting* setiap bulannya. Langkah ini menegaskan komitmen untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut sesuai dengan perkembangan aktual di lapangan. Namun, pelaporan terkait by name by address anak yang terindikasi *stunting* tidak disebarluaskan demi melindungi privasi keluarga dan anak tersebut. Sementara itu, orang tua dapat melihat perkembangan anaknya melalui buku laporan posyandu yang dimiliki masing-masing anak. Hasil wawancara terkait pengenalan stakeholder oleh masyarakat menunjukkan hasil bahwa masyarakat cukup mengenal pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan penanganan *stunting* yang ada di Kelurahan Benua Melayu Laut karena mereka bertugas dan sebagian besar bertempat tinggal di Kelurahan Benua Melayu Laut.

Tabel 3. 2

Laporan Kegiatan Penanganan *Stunting* di Kelurahan Benua Melayu Laut

No	Kegiatan	Narasumber	Dokumentasi
1.	Penjelasan tentang menu untuk Ibu hamil	Kader Dashat Kampung KB Aulia, S.Gz	

2.	Penjelasan tentang menu untuk Ibu Baduta	Kader Kampung KB Aulia, S.Gz	
3.	Penjelasan tentang menu untuk Ibu hamil	Kader Kampung KB Aulia, S.Gz	
4.	Penjelasan tentang menu untuk Ibu hamil	Kader Kampung KB Aulia, S.Gz	
5.	Penjelasan tentang menu untuk Catin	Kader Kampung KB Herny A.Md,Gz	

6.	Penjelasan tentang menu untuk Ibu hamil	Kader Dashat Kampung KB Aulia,S.Gz Lindriaty Drg,Multi Juto Bhatarendro,MPPK	
7.	Penjelasan Ketahanan Keluarga dalam Pencegahan Stunting	Ahli Gizi dari Puskesmas Hj.Ellyani,S.Pd	
8.	Penjelasan tentang menu untuk Catin, bumil, baduta	Kader Dashat Kampung KB Korlap KB Kecamatan Pontianak Selatan	

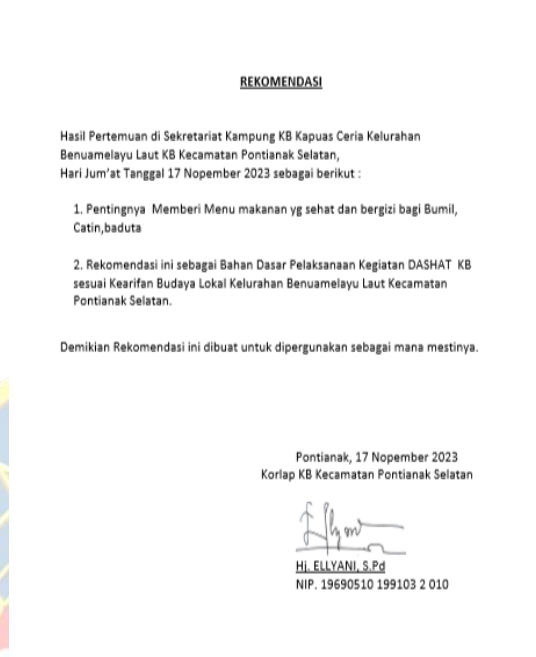
9.	Penjelasan tentang menu untuk Catin, bumil, baduta	Dra. Karmila Kader Dashat Kampung KB Herny Eka Agustia,A.Md,Gz	
10.	Penyerahan Paket Menu Sehat untuk Sasaran	Ahli Gizi dari Puskesmas Hj.Ellyani,S.Pd	

Sumber: Diolah oleh penulis, 2024

3. Komitmen terhadap Proses

Penulis melakukan wawancara, observasi, serta studi dokumentasi terkait ada atau tidaknya dokumen kesepakatan antar stakeholder dan forum pembuat komitmen yang dilakukan dalam rangka penanganan *stunting* dalam program ini. Berdasarkan wawancara diketahui bahwa dokumen kesepakatan antar stakeholder sudah terbentuk dimana kesepakatan tersebut tertuang dalam “Rekomendasi” pada setiap pertemuan. Rekomendasi tersebut tertuang di dalam laporan. Namun, komitmen dengan pihak swasta masih bersifat tentatif. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa telah terbentuk komitmen antara para pemangku kepentingan dalam penanganan *stunting* di Kelurahan Benua Melayu Laut, namun masih ada peluang untuk memperkuat kerjasama dengan sektor swasta. Ini menunjukkan bahwa meskipun upaya kolaborasi telah berjalan, masih terdapat potensi untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan semua pihak terkait, termasuk pihak swasta, dalam upaya penanganan *stunting* tersebut.

Gambar 3. 1 Rekomendasi Pertemuan Rutin Penanganan *Stunting*



Komitmen untuk menangani isu seperti *stunting* di Kelurahan Benua Melayu Laut melalui Program Kampung Keluarga Berkualitas dapat terlihat dari adanya forum kerjasama yang aktif terjalin. Merealisasikan terbentuknya forum tersebut maka diadakan pertemuan dalam rangka penanganan *stunting* tersebut. forum yang telah terbentuk melalui pertemuan rutin ini menjadi wadah bagi para stakeholder untuk berinteraksi, berdiskusi, dan mencapai kesepakatan bersama dalam upaya penanganan *stunting*.

Tabel 3. 3
Daftar Anggota Forum yang Membuat Komitmen Bersama

No.	Anggota Forum/ Stakeholder terlibat
1.	Bidang Pengendalian Penduduk DP2KBP3A Kota Pontianak
2.	Ahli Gizi/ Puskesmas
3.	Koordinator Lapangan Kampung KB
4.	Kelurahan Benua Melayu Laut
5.	Kader Penyuluh Kesejahteraan Keluarga
6.	Ibu Hamil/Ibu Balita/Remaja Calon Pengantin

Sumber: Diolah oleh penulis, 2024

4. Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan dalam menghadapi permasalahan *stunting*. Para stakeholder yang terlibat perlu memiliki pemahaman yang seragam mengenai urgensi, kompleksitas, dan dampak permasalahan *stunting* terhadap masyarakat dan pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lestari, Lurah Kelurahan Benua Melayu Laut, pemahaman di antara para pemangku kepentingan terbentuk melalui pertemuan rutin yang diadakan. Dalam pertemuan-pertemuan ini, para stakeholder menyadari bahwa penanganan *stunting* merupakan

kebutuhan mendesak karena dampaknya yang signifikan terhadap kesehatan dan masa depan generasi penerus bangsa. Pemahaman ini menjadi dasar penting yang memotivasi para stakeholder untuk terlibat aktif dalam upaya penanganan *stunting*.

Hasil wawancara dengan perwakilan dari sektor swasta yang bekerja sama dalam penanganan *stunting* di Kelurahan Benua Melayu Laut, juga mengonfirmasi pemahaman tersebut. Sektor swasta telah menyadari bahwa penanganan *stunting* bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama untuk menjamin masa depan yang lebih baik bagi generasi muda dan bangsa secara keseluruhan. Kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam penanganan *stunting* menunjukkan bahwa pemahaman mengenai urgensi dan dampak masalah *stunting* telah tersebar luas di antara berbagai pihak, termasuk sektor swasta.

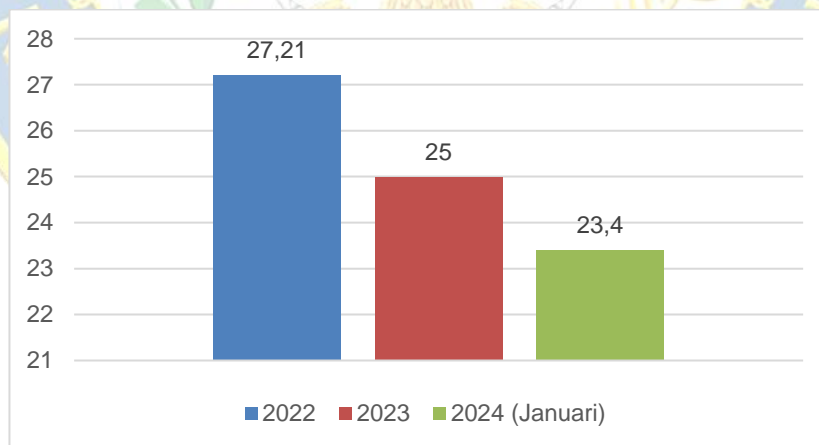
Sementara itu, hasil wawancara dengan salah satu anggota masyarakat yang mengikuti kegiatan terkait pencegahan dan penanganan *stunting* menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat sudah memahami masalah *stunting* secara umum. Namun, masih ada beberapa orang yang bersikap acuh karena melihat anak-anak mereka tampak aktif.

5. Hasil Sementara

Program Kampung Keluarga Berkualitas membawa pengaruh ke arah positif yang bisa dilihat dari angka prevalensi *stunting* yang mengalami penurunan. Hasil sementara yang tercapai selama proses kerjasama dalam penanganan *stunting* di Kelurahan Benua Melayu Laut melalui Program Kampung KB juga memberikan dorongan yang signifikan kepada pemangku kepentingan yang terlibat.

Gambar 3. 2

Diagram Hasil Sementara Jumlah Kasus *Stunting* di Kelurahan Benua Melayu Laut



Sumber: Diolah oleh penulis, 2024

Berdasarkan diagram yang menunjukkan hasil sementara jumlah kasus *stunting* di Kelurahan Benua Melayu Laut, terlihat bahwa terjadi penurunan angka prevalensi *stunting* dari sebesar 25% dari total jumlah balita yang ikut posyandu sebanyak 128 orang di tahun 2023 turun menjadi 23,4% pada Januari tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa program penanganan *stunting* yang telah diterapkan di Kelurahan Benua Melayu Laut telah memberikan dampak positif. Meskipun belum besar, namun adanya penurunan

jumlah kasus *stunting* menjadi indikasi bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam kerangka program tersebut sudah mulai memberikan hasil yang dapat diukur.

3.2 Faktor Penghambat

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam individu atau organisasi itu sendiri. Faktor internal dalam hal ini penulis menggunakan indikator kesadaran masyarakat dan kebiasaannya. Kesadaran masyarakat menjadi hal yang penting karena hal ini berkaitan langsung atau bersentuhan langsung dengan anak. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa kesadaran terhadap penanganan dan pencegahan *stunting* masih rendah di Kelurahan Benua Melayu Laut. Sebagian masyarakat, termasuk beberapa orang tua, cenderung tidak membawa anak-anak mereka ke posyandu karena mereka beranggapan bahwa anak-anak mereka sehat dan tidak mengalami *stunting* hanya karena tidak terlihat sakit secara fisik. Namun, kesadaran ini tidak sepenuhnya akurat, seperti yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat yang menyadari bahwa tanda-tanda kesehatan anak tidak hanya terlihat dari keaktifannya saja.

Kebiasaan masyarakat dalam hal penanganan *stunting* memainkan peran penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Beberapa kebiasaan yang masyarakat lakukan, seperti tidak membawa anak ke posyandu secara teratur atau mengabaikan tanda-tanda *stunting*, dapat menghambat upaya-upaya untuk mengurangi angka *stunting*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah di Kelurahan Benua Melayu Laut, diketahui bahwa zaman sekarang para orang tua cenderung lebih banyak terpengaruh oleh penggunaan gadget, menyebabkan waktu yang dihabiskan untuk bermain gadget lebih lama dan mengurangi rasa tanggung jawab terhadap anak-anak. Selain itu, orang tua saat ini cenderung lebih menyukai hal yang praktis, yang dapat mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap kecukupan gizi anak-anak. Pihak puskesmas juga mengungkapkan bahwa faktor penghambat terkait kebiasaan masyarakat adalah adanya rasa malas atau kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, terutama dalam hal peduli terhadap anak-anak. Mereka lebih condong kepada hal-hal yang praktis, termasuk dalam memberi makan anak-anak. Hal ini tercermin dalam kebiasaan masyarakat yang cenderung memesan makanan yang mungkin kurang gizi atau hanya memberi susu formula kepada anak-anak.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah elemen-elemen yang berada di luar kendali langsung individu atau organisasi, namun dapat mempengaruhi kinerja, keputusan, dan keberhasilan mereka. Penulis melihat dua indikator pada hal ini yaitu keterlibatan stakeholder dan anggaran program ini. Berdasarkan wawancara dengan pihak Puskesmas dapat diketahui bahwa dalam proses penanganan *stunting* di Kelurahan Benua Melayu Laut, kehadiran saat pertemuan sering kali menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan dan kesepakatan yang efektif. Diwakilkannya pimpinan atau orang yang bertanggung jawab dalam pertemuan dapat menghambat proses tersebut karena orang yang diwakilkan mungkin tidak memiliki kewenangan penuh. Hal ini didukung oleh informasi dari wawancara dengan Ketua RW dan kader PKK yang menunjukkan bahwa diwakilkannya pimpinan seringkali disebabkan oleh adanya kegiatan atau pertemuan di tempat lain.

Anggaran merupakan elemen krusial dalam penyelenggaraan sebuah kegiatan, termasuk Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Benua Melayu Laut. anggaran dalam pelaksanaan program ini berasal dari dana BOKB dan setiap tahunnya setiap posyandu mendaoatkan bantuan dana sebesar tiga juta rupiah, tetapi dana tersebut masih dianggap kurang untuk mendukung berbagai kegiatan penanganan *stunting* yang ada. Oleh karena itu, masyarakat serta aparat sipil negara di lingkup Kecamatan Pontianak Selatan turut dilibatkan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa secara umum kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam rangka penanganan *stunting* melalui Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Benua Melayu Laut sudah berjalan dengan cukup baik karena pada pelaksanaannya sudah ada pertemuan rutin yang dilakukan dimana pertemuan tersebut menghasilkan sebuah komitmen bersama dan pemahaman yang sama di antara stakeholder. Adapun komitmen yang terjadi belum melibatkan pihak swasta secara resmi sehingga keterlibatannya bersifat tentatif. Perihal kepercayaan antar stakeholder juga sudah terbangun karena adanya laporan berkala yang disampaikan dan pihak masyarakat sendiri mengenal pribadi dari perwakilan setiap pihak yang turun ke lapangan. Selanjutnya hasil dari pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Benua Melayu Laut ini sudah menunjukkan perubahan ke arah yang positif yang ditandai dengan berkurangnya jumlah kasus *stunting*.

Penanganan *stunting* melalui Program Kampung Keluarga Berkualitas terkendala beberapa hal seperti minimnya kesadaran masyarakat terhadap *stunting*, kebiasaan masyarakat yang malas dan menyukai hal yang praktis, terhambatnya pengambilan keputusan pada saat pertemuan karena pimpinan atau orang yang bertanggungjawab dari masing-masing stakeholder diwakilkan oleh bawahannya, dan anggaran yang diberikan masih kurang sehingga kegiatan masih menggunakan biaya dari swadaya masyarakat dan bantuan dari aparat sipil negara di lingkup Kecamatan Pontianak Selatan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni pada waktu penelitian. Keterbatasan waktu menyebabkan penulis harus mempercepat kegiatan observasi dan wawancara, sehingga informasi yang diperoleh menjadi terbatas.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis mengakui bahwa hasil penelitian ini masih bersifat awal, sehingga disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan di lokasi serupa yang berfokus pada kolaborasi penanganan *stunting* dengan pihak swasta.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih khususnya ditujukan kepada orang tua saya, Kepala Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta jajarannya, Lurah Kelurahan Benua Melayu Laut beserta perangkat kelurahan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, masyarakat kelurahan yang kooperatif, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian serta penulisan ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Apriani, A. reski. (2016). Efektivitas Program Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan

Benteng Kapupaten Kepulauan Selayar. Universitas Hasanuddin.

- Bedasari, H., Novita, F., Azmi, Razali, M. T., & Wana, I. S. L. (2022). Strategi Dinas Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Penanganan *Stunting* (Studi Kasus Di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun). *Jurnal Kemunting*, 3(2), 703–722.
- Ekananda. (2021). Evaluasi Program Inovasi Penurunan *Stunting* Di Puskesmas Simpang Periuk Kota Lubuklinggau [Universitas Sriwijaya]. In Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. <https://repository.unsri.ac.id/53487/>
- Fazhira, E. (2021). Implementasi kebijakan penurunan *stunting* di kabupaten kampar. In Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syaif Kasim Riau.
- Fitria, D. D. (2022). Evaluasi Strategi Menekan Laju Penderita *Stunting* di Kabupaten Buton Selatan [Universitas Hasanuddin]. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/23869/%0Ahttp://repository.unhas.ac.id/id/eprint/23869/2/E011181315_skripsi_10-05-2022_1-2.pdf
- Lambelanova, Rossy; Ramadhan, M. B. Peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) dalam Melaksanakan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- Lestari, P., Pralistami, F., Ratna, D., Hamijah, S., & Harahap, R. A. (2022). Peranan Pemerintah Desa dalam Pencegahan *Stunting* Di Desa Kencana Kecamatan Balai Jaya Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 2227. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2789>
- Noviansyah. (2022). Strategi Percepatan Pencegahan *Stunting* Dengan Pendekatan Keagamaan Guna Mewujudkan Generasi Berkualitas (Studi pada Wilayah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu) [Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung]. In Disertasi. <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-mencari-strategi-percepatan-pencegahan-stunting>
- Pratiwi, D. J. (2023). Strategi Pencegahan *Stunting* Di Kecamatan Medan Timur Kota Medan. Universitas Medan Area.
- Purba, S. H. (2019). Analisis Impelementasi Kebijakan Penurunan *Stunting* di Desa Secanggih Kabupaten Langkat. In *Duke Law Journal* (Vol. 1, Issue 1). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Suhroh, L., & Pradana, G. W. (2021). Peran Pemerintah Desa Ko'Olan Dalam Penekanan *Stunting* Melalui Program Gopo (Gojek Posyandu) Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Bangkalan. *Publika*, 9, 93–104. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n1.p93-104>